



Pemerintah Provinsi Lampung

Rencana Kinerja Tahunan TA. 2018



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id

E-Mail : perencanaankoperasi15@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH TA'ALLA yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 10 (*Sepuluh*) program dan 45 (*Empat Puluh Lima*) kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 7.250.000.000,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2018

KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
HALAMAN RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum	I – 2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	I – 4
1.4. Susunan Organisasi	I – 6
1.5. Maksud dan Tujuan	I – 9
BAB II RENCANA STRATEGIS	
2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019	... II – 1
2.2. Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu	... II – 4
2.3. Rencana Kerja Tahun 2018	... II – 5
BAB IV PENUTUP	... VI – 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 7.250.000.000,- (*Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), mencakup 45 (*Empat Puluh lima*) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 394.000.000,-
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 402.720.000,-
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 120.000.000,-
4. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 30.580.000,-
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan biaya Rp. 15.000.000,-
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan biaya Rp. 10.000.000,-
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan biaya Rp. 18.000.000,-
8. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 14.880.000,-
9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 145.560.000,-
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan biaya Rp. 132.000.000,-
11. Pameran dan Promosi Pembangunan, dengan biaya Rp. 108.000.000,-
12. Penatausahaan barang milik daerah, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan biaya Rp. 25.000.000,-
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 173.380.000,-
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 25.000.000,-
17. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 40.000.000,-
18. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 87.551.500,-

19. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 211.800.000,-
20. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
21. Peningkatan Data dan Informasi, dengan biaya Rp. 66.000.000,-
22. Monev dan sinkronisasi program, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
23. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
24. Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
25. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah, dengan biaya Rp. 625.000.000,-
26. Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM, dengan biaya Rp. 75.176.000,-
27. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), dengan biaya Rp. 50.000.000,-
28. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi, dengan biaya Rp. 76.176.250,-
29. Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
30. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
31. Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
32. Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeri, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
33. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
34. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-
35. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
36. Peningkatan jenis usaha koperasi, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
37. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 2.000.000.000,-
38. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi, dengan biaya Rp. 115.000.000,-
39. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi, dengan biaya Rp. 150.000.000,-

40. Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
41. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
42. Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
43. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, dengan biaya Rp. 70.000.000,-
44. Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi, dengan biaya Rp. 200.176.250,-
45. Penyelenggaraan musrenbang SKPD, dengan biaya Rp. 80.000.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada mulanya Kantor Wilayah Perindustrian dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2007, Diskoperindag Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung terpisah menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung bergabung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sampai dengan akhir Desember 2014 yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diubah kembali menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Provinsi Lampung. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung berubah Nomenklatur tepatnya tanggal 21 Nopember 2016 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung berubah Nomenklatur tepatnya tanggal 21 Nopember 2016 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
- d. pemfasilitasian tugas pernbantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
- f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
- i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat provinsi;
- j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- l. memfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Susunan Organisasi

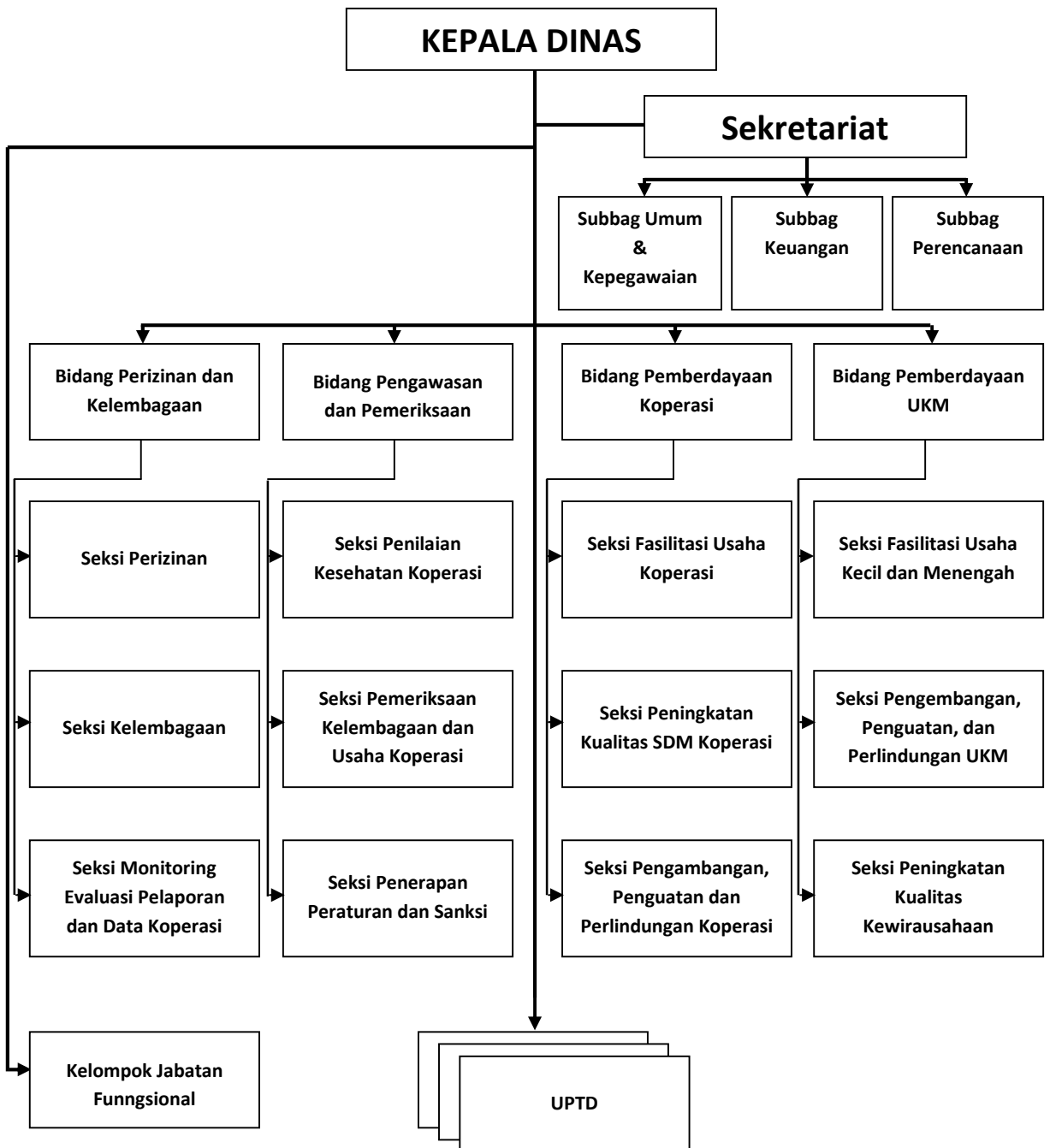
- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Perizinan;
 2. Seksi Kelembagaan dan;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang- bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e, dan f bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf I, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UKM

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor : 8 Tahun 2016
Tanggal : 21 Nopember 2016



1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah merupakan sebagai tindaklanjut / break down dari Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2018 (desentralisasi) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung merupakan rencana Pembangunan tahunan yang menjabarkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan anggaran sesuai program/kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang dituangkan dalam dokumen RKT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2018.

1.5.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah memberi acuan dan tolok ukur untuk mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran pada tahun bersangkutan dalam rangka perwujudan peningkatan Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan analisis pada terdahulu maka dapat disusun Rencana Strategis yaitu Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Program pembangunan pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama lima tahun mendatang (2015 sampai dengan 2019) terdiri atas 13 (tiga belas) program pembangunan sebagaimana yang terinci dalam Tabel 5.1, yaitu:

1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya
2. Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah KUMKM yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD
3. Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang meningkat usahanya
4. Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah koperasi dan umkm yang berkembang kelembagaannya
5. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM dengan indikator kinerja adalah meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitasnya

6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Revitalisasi Kelembagaan dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi yang meningkatkan kualitas kelembagaannya
7. Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan indikator kinerjanya adalah meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan berkembang usahanya serta kelembagaannya
8. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program adalah terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib administrasi
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program adalah tersedianya sarana dan prasarana aparatur
10. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja program adalah jumlah paket kegiatan penunjang peningkatan disiplin aparatur.
11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kinerja program adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan peningkatan sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan indikator kinerja adalah terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan

2.1.1. Matriks Renstra 2015 – 2019

2.1.1. Matrik Renstra 2015 - 2019

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan Bidang	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
2	11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
2	11 15 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah										
2	11 15 2 Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal permodalan Bagi KUMKM	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 3 Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	0		100.000.000	50 Koperasi	150.000.000	75 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi
2	11 15 5 Rakor dengan Dinas/Instansi terkait tentang fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 6 Bintek dan transplantasi bagi Pengelola Koperasi Pola Konvensional dan syariah	0		100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11 15 7 Rakor Validasi/Pemutakhiran Data KSP/USP dan KJKS/UJKS	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 8 Workshop Evaluasi Penyaluran Dana Bergulir	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 9 Rakor pemberdayaan KUMKM di bidang pembiayaan	100.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11 15 10 Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	105.000.000	2 Angkatan	85.000.000	2 Angkatan	90.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan
2	11 15 11 Rakor Fasilitasi dan sosialisasi perusahaan penjamin kredit daerah	110.000.000	4 Kali	0		0		0		0	
2	11 15 12 Study komparasi tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi pengelola koperasi pondok pesantren	100.000.000	15 Orang	200.000.000	20 Orang	220.000.000	20 Orang	240.000.000	20 Orang	270.000.000	20 Orang
2	11 15 13 Rakor Pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM	120.000.000	15 kab/kota	120.000.000	15 kab/kota	120.000.000	15 kab/kota	125.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota
2	11 15 14 Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	90.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg
2	11 15 15 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota	0		80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg
2	11 15 16 Tranplantasi Dalam Rangka Pembentukan PPKD Provinsi Lampung	80.000.000	1 Kali	0		0		0		0	

2	11	15	17	Monitoring dan evaluasi program TPKU pada Pondok Pesantren dan SMK/SMU	0	100.000.000	15 Orang	110.000.000	15 Orang	120.000.000	15 Orang	135.000.000	15 Orang
2	11	15	18	Bimtek menggali potensi ide bisnis	0	160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	15	19	Rakor program penilaian kesehatan dan pengawasan KSP/USP	0	200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali	200.000.000	4 Kali
2	11	15	20	Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	0	50.000.000	50 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi
2	11	15	21	Bimbingan teknis penyusunan proposal pengembangan usaha bagi KSP/USP	0	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11	15	22	Rakor penyusunan program pembinaan KSP/USP yang sehat mandiri dan berkembang	0	200.000.000	20 Paket	200.000.000	200 Paket	200.000.000	200 Paket	200.000.000	200 Paket
2	11	15	23	Rakor dengan dinas /instansi/pemangku kepentingan tentang peluang permodalan bagi KSP/USP	0	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi
2	11	15	24	Monev penilaian dan pengawasan kegiatan usaha bagi KSP/USP, KJKS/UJKS	0	100.000.000	50 Koperasi	150.000.000	75 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi	200.000.000	100 Koperasi
2	11	15	25	Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri	0	900.000.000	8 Keg	800.000.000	8 Keg	900.000.000	8 Keg	700.000.000	8 Keg
2	11	15	26	Rapat koordinasi provinsi dengan pusat	0	240.000.000	3 Keg	240.000.000	3 Keg	180.000.000	3 Keg	180.000.000	3 Keg
2	11	15	27	Pendataan dan pembinaan KUMKN	0	70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg
2	11	15	28	Sosialisasi KUMK 15 kab/kota	0	70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg	75.000.000	1 Keg
2	11	15	29	Temu konsultasi dinas koperasi/UMKM se Provinsi Lampung	0	80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg
2	11	15	30	Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi	0	180.000.000	2 Keg	190.000.000	2 Keg	180.000.000	2 Keg	180.000.000	2 Keg
2	11	15	31	Workshop evaluasi penyaluran dana bergulir	0	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11	15	33	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	0	300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi	300.000.000	1 Provinsi
2	11	15	34	Promosi produk-produk unggulan di anjungan TMII	0	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	300.000.000	1 Keg
2	11	15	35	Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	0	200.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	36	Bimtek manajemen usaha koperasi pengelolaan sistem resi gudang (SRG)	0	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg
2	11	15	37	Bimtek manajemen usaha pedagang kaki lima (PKL)	0	100.000.000	1 Keg	110.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	38	Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM	0	90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg

2	11	15	39	Bimtek peningkatan jaringan usaha dan pemasaran bagi KUMKM berbasis produk unggulan daerah	0		100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	15	40	Bimtek manajemen usaha bagi pengelola koperasi pariwisata	0		80.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	95.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg
2	11	15	41	Transplantasi luar daerah provinsi lampung tentang pengelolaan pariwisata oleh koperasi	0		120.000.000	1 Keg	140.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg
2	11	15	42	Workshop temu usaha UKM Center	0		30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg
2	11	15	43	Pembinaan UKM di UKM Center	0		1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg	1.500.000.000	1 Keg
2	11	15	44	Bimtek anggota koperasi yang menghasilkan produk yang berdaya saing dalam menghadapi MEA	0		225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg
2	11	15	45	Bimtek bagi pengurus koperasi pengelola pasar tradisional	0		250.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg
2	11	15	46	Transplantasi bagi pengurus koperasi pasar tradisional ke luar provinsi	0		300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg	300.000.000	2 Keg
2	11	15	47	Pembinaan KUMKM dalam menghadapi MEA	0		225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg	225.000.000	3 Keg
2	11	15	48	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	0		0		100.000.000	10 KUMKM	100.000.000	30 KUMKM	100.000.000	30 KUMKM
2	11	16		Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM										
2	11	16	1	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	600.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%
2	11	16	4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	205.000.000	160 KUMKM	250.000.000	175 KUMKM	275.000.000	180 KUMKM	325.000.000	200 KUMKM	375.000.000	220 KUMKM
2	11	16	5	Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	130.000.000	80 KUMKM	150.000.000	80 KUMKM	200.000.000	90 KUMKM	250.000.000	100 KUMKM	300.000.000	110 KUMKM
2	11	16	6	Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima dana bergulir BLUD	120.000.000	60 KUMKM	150.000.000	70 KUMKM	200.000.000	70 KUMKM	250.000.000	80 KUMKM	325.000.000	90 KUMKM
2	11	16	7	Sosialisasi penyaluran pinjaman BLUD KUMKM	70.000.000	70 KUMKM	100.000.000	85 KUMKM	175.000.000	100 KUMKM	225.000.000	140 KUMKM	300.000.000	170 KUMKM
2	11	17		Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM										
2	11	17	1	Fasilitasi Peluang Permodalan bagi KUMKM	0		150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan	150.000.000	2 Angkatan
2	11	17	4	Bimtek dan Transplantasi bagi Pengelola KUMKM	0		100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	17	8	Bimtek pengembangan usaha simpan pinjam pola konvensional dan pola syariah	0		170.000.000	4 Angkatan	180.000.000	4 Angkatan	180.000.000	4 Angkatan	200.000.000	4 Angkatan
2	11	17	9	Pembinaan LKM / BMT penerima bantuan modal kerja	0		100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM	100.000.000	50 LKM

2	11	17	10	Pembinaan KSP / USP penerima dana bergulir MAP, PKPS-BBM, agribisnis/sektoral P3KUM pola konvensional dan P3KUM pola syariah	0	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi
2	11	17	11	Rakor antara KSP/USP dengan lembaga keuangan	0	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali
2	11	18		Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM									
2	11	18	1	Diklat Strategi Pemasaran Bagi Pengelola Koperasi dan UMKM	0	70.000.000	30 Orang	0	0	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	18	2	Diklat Studi Kelayakan Usaha bagi Pengelola Koperasi dan UMKM	0	0	0	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	18	3	Diklat Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Bagi Pembina Koperasi dan UMKM	0	0	0	75.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang
2	11	18	4	Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi dan UMKM	0	0	0	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	18	5	Diklat Kewirausahaan bagi pengelola UMKM	0	50.000.000	25 Orang	0	0	75.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang
2	11	18	6	Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita	0	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	0	0	0	0
2	11	18	7	Pembinaan kelembagaan usaha dan administrasi bagi KSP/USP	0	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi
2	11	18	8	Bimtek manajemen pengembangan usaha dan kemitraan bagi koperasi dan jasa keuangan	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	18	9	Diklat manajemen koperasi bagi pengelola koperasi wanita	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0	0	0	0
2	11	19		Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM									
2	11	19	6	Pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas wirausaha pemula	0	160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	19	7	Bimtek penilaian kesehatan bagi pejabat	0	85.000.000	2 Angkatan	90.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan	100.000.000	2 Angkatan
2	11	19	8	Bimtek koperasi jasa keuangan bagi manajer berbasis kompetensi pola konvensional	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	9	Bimtek koperasi jasa keuangan bagi manajer berbasis kompetensi pola syariah	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	10	Diklat koperasi jasa keuangan bagi kasir berbasis kompetensi pola syariah	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	11	Bimtek perpajakan bagi pengelola koperasi	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	12	Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuangan	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang
2	11	19	13	Diklat pengawasan dan pembinaan koperasi bagi tenaga pengawas dan Pembina	0	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang

2	11	19	14	Bimtek sistem tanggung renteng bagi kopwan	0		200.000.000	100 Orang	0		0		0	
2	11	19	15	Bimtek vokasional bagi anggota kopwan	0		100.000.000	75 Orang	0		0		0	
2	11	19	16	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	0		0		0		0		0	
2	11	20		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan										
2	11	20	9	Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	0		160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	20	10	Sosialisasi program tempat praktek keterampilan usaha (TPKU) bagi SMK/SMU dan Pondok Pesantren	0		160.000.000	60 Orang	180.000.000	60 Orang	195.000.000	60 Orang	220.000.000	60 Orang
2	11	20	11	Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	0		150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang
2	11	20	12	Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	0		125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang	125.000.000	30 Orang
2	11	20	13	Penyusunan program pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	0		150.000.000	100 Koperasi	175.000.000	125 Koperasi	175.000.000	150 Koperasi	175.000.000	150 Koperasi
2	11	20	14	Penyebarluasan peraturan / perundangan di bidang pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP / USP	0		100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket	100.000.000	250 Paket
2	11	20	15	Tranplantasi manajemen bagi pengurus KSP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	0		325.000.000	4 Angkatan	350.000.000	4 Angkatan	320.000.000	4 Angkatan	400.000.000	4 Angkatan
2	11	20	16	Pencetakan juknis peluang permodalan bagi KSP/USP	0		160.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku	175.000.000	300 Buku
2	11	20	17	Identifikasi KSP/USP calon penerima program pembiayaan dari LPDB dan lembaga lainnya	0		75.000.000	150 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi	100.000.000	200 Koperasi
2	11	20	18	Verifikasi terhadap KSP/USP calon penerima program pembiayaan	0		150.000.000	150 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi	200.000.000	200 Koperasi
2	11	21		Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah										
2	11	21	1	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	200.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota
2	11	21	2	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	100.000.000	15 kab/kota	650.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota	500.000.000	15 kab/kota
2	11	21	3	Workshop Revitalisasi Koperasi	80.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	150.000.000	100 Koperasi	120.000.000	100 Koperasi
2	11	21	4	Peningkatan Pemahaman terhadap aturan perpajakan bagi koperasi	100.000.000	100 KUMKM	0		0		0		0	

2	11	21	5	Rakor pembinaan terhadap Koperasi tidak aktif	150.000.000	15 kab/kota	165.000.000	15 kab/kota	180.000.000	15 kab/kota	198.000.000	15 kab/kota	217.800.000	15 kab/kota
2	11	21	6	Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan kewirausahaan melalui pembentukan UKM Center	120.000.000	30 Orang	0		0		135.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang
2	11	21	7	Pemeringkatan Koperasi	100.000.000	60 Koperasi	110.000.000	60 Koperasi	121.000.000	60 Koperasi	133.100.000	60 Koperasi	146.410.000	60 Koperasi
2	11	21	8	Diklat membuat Website dan Internet Marketing bagi KUMKM	89.867.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	9	Pelatihan Akuntansi Komputer bagi koperasi usaha Ritel	80.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	10	Diklat Ketrampilan menjahit bagi Koppontren	80.000.000	32 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	11	Bimtek Peningkatan kelembagaan bagi Koperasi tidak akif	150.000.000	60 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	12	Diklat Kewirausahaan Bidang Boga bagi Ibu RT dan Remaja Putus sekolah	80.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	13	Diklat pembuatan aneka souvenir khas Lampung	110.000.000	20 Orang	0		0		0		0	
2	11	21	14	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	134.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota	150.000.000	15 kab/kota	160.000.000	15 kab/kota	160.000.000	15 kab/kota
2	11	21	15	Bimtek manajemen usaha bagi pengelola Koperasi penerima Bansos	70.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	90.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg
2	11	21	16	Bimtek Kewirausahaan bagi UMKM	80.000.000	30 Orang	0		90.000.000	30 Orang	0		110.000.000	30 Orang
2	11	21	17	Pengembangan, pengendalian dan pengawasan Koperasi simpan pinjam	130.000.000	60 Orang	0		140.000.000	60 Orang	0		150.000.000	60 Orang
2	11	21	18	Pengembangan SDM bagi Pembina dan Koperasi Simpan Pinjam	150.000.000	60 Orang	0		150.000.000	60 Orang	160.000.000	60 Orang	170.000.000	60 Orang
2	11	21	19	Diklat pemasaran hasil usaha	0		0		70.000.000	30 Orang	85.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	20	Diklat manajemen bisnis ritel	0		70.000.000	30 Orang	0		0		0	
2	11	21	21	Diklat akuntansi usaha bisnis ritel	0		0		70.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	22	Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	0		75.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang
2	11	21	23	Diklat manajemen jasa keuangan syariah	0		0		0		75.000.000	30 Orang	0	
2	11	21	24	Diklat manajemen simpan pinjam terapan bagi pengelola koperasi	0		0		0		0		80.000.000	30 Orang
2	11	21	25	Diklat manajemen usaha simpan pinjam konvensional	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	26	Pelatihan kewirausahaan bagi wanita dan anak wilayah pesisir	0		75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	0		0	
2	11	21	27	Pemberdayaan kelompok usaha pemula	0		80.000.000	2 KUMKM	80.000.000	2 KUMKM	85.000.000	2 KUMKM	90.000.000	2 KUMKM
2	11	21	28	Diklat kewirausahaan bagi koperasi baru	0		70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang

2	11	21	29	Diklat perkoperasian bagi anggota koperasi	0	65.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang		
2	11	21	30	Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang		
2	11	21	31	Diklat manajemen keuangan bagi pengelola koperasi	0	75.000.000	30 Orang	0	0	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang		
2	11	21	32	Diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan RAT bagi koperasi	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang		
2	11	21	33	Diklat perpajakan bagi koperasi	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang		
2	11	21	35	Diklat akuntabilitas bagi pengelola koperasi	0	0	0	0	0	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang		
2	11	21	36	Diklat studi kelayakan usaha bagi pengelola koperasi dan UMKM	0	0	65.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	
2	11	21	37	Diklat analisa pinjaman / pembiayaan usaha bagi pengelola koperasi	0	0	0	0	0	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang		
2	11	21	38	Diklat akuntansi dasar usaha kecil dan mengengah bagi pengelola koperasi	0	75.000.000	30 Orang	0	0	0	0	0	0		
2	11	21	39	Diklat akuntansi simpan pinjam dasar pola konvensional	0	0	0	0	75.000.000	30 Orang	0	0	0		
2	11	21	40	Diklat akuntansi simpan pinjam lanjutan pola konvensional	0	0	0	0	75.000.000	30 Orang	0	0	0		
2	11	21	41	Diklat akuntansi jasa keuangan syariah	0	0	0	0	75.000.000	30 Orang	0	0	0		
2	11	21	42	Diklat analisa laporan keuangan simpan pinjam pola konvensional	0	0	70.000.000	30 Orang	0	0	0	0	0		
2	11	21	43	Diklat audit laporan keuangan	0	0	0	0	75.000.000	30 Orang	0	0	0		
2	11	21	44	Diklat pengelola KSP/USP koperasi berbasis kompetensi pola konvensional	0	70.000.000	30 Orang	0	0	0	0	0	0		
2	11	21	45	Diklat perkoperasian bagi pamong desa	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	0	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	
2	11	21	46	Diklat peningkatan keterampilan aplikasi akuntansi koperasi	0	70.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang
2	11	21	47	Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	0	200.000.000	80 Orang	220.000.000	80 Orang	240.000.000	80 Orang	270.000.000	80 Orang	80 Orang	
2	11	21	48	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	0	0	100.000.000	60 Koperasi	100.000.000	60 Koperasi	100.000.000	60 Koperasi	100.000.000	60 Koperasi	
2	11	21	49	Diklat dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	0	0	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	
4				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	5			Pendidikan dan Pelatihan											
4	5	19		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
4	5	19	1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	60.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan		

5				URUSAN PENDUKUNG										
5	4			Non Urusan (Eks BAU)										
5	4	15		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
5	4	15	1	Penyediaan jasa surat menyurat	28.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan
5	4	15	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan
5	4	15	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	212.400.000	12 Bulan	245.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	280.000.000	12 Bulan	315.000.000	12 Bulan
5	4	15	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.443.600	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan
5	4	15	10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan
5	4	15	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	15	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.054.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan
5	4	15	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0		0		0		0		0	
5	4	15	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan
5	4	15	17	Penyediaan makanan dan minuman rapat	35.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan
5	4	15	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	148.907.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan
5	4	15	22	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	68.004.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan
5	4	15	29	Pameran dan Promosi Pembangunan	53.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	225.000.000	1 Keg
5	4	16		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
5	4	16	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0		0		0		300.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket
5	4	16	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	400.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	450.000.000	1 Paket
5	4	16	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0		0		0		0		0	
5	4	16	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0		200.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan
5	4	16	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	143.253.400	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan
5	4	16	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
5	4	17		Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
5	4	17	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99.325.000	3 Paket	115.000.000	3 Paket	120.000.000	3 Paket	135.000.000	3 Paket	155.000.000	3 Paket
5	4	19		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										

5	4	19	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	50.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
5	4	19	26	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	50.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan
5	4	19	27	Musrenbang Tahun 2015	72.929.000	1 Dokumen	0		0		0		0	
5	4	19	28	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0		60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen
5	4	19	30	Kerjasama Anggota MPU	0		75.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg	85.000.000	1 Keg
5	4	19	37	Kajian Pengembangan UMKM Melalui pengembangan Produk Unggulan Agribisnis	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	0		0		0	
5	4	19	39	Rapat Teknis anggota MPU Sektor Koperasi	89.000.000	1 Keg	0		0		0		0	
5	4	19	40	Kerja sama Anggota MPU Sektor Koperasi dan UMKM, Sektor Perdagangan dan sektor Industri	50.000.000	1 Keg	0		0	0	0	0	0	0
5	4	19	43	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan kegiatan sektor Koperasi dan UMKM, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri	50.000.000	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	19	128	Peningkatan jasmani dan rohani aparatur	0		20.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	19	129	Evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan UMKM	0		0		0		0		100.000.000	1 Dokumen
5	4	19	130	Pameran dan promosi produk anggota-anggota Mitra Praja Utama (MPU)	0		0		50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg
5	4	20		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
5	4	20	1	Penyusunan laporan Keuangan	27.800.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	75.000.000	2 Laporan
5	4	20	3	Penyusunan Laporan Bulanan	10.715.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan
5	4	20	6	Penyusunan Renstra -	0		0		0		0		100.000.000	1 Dokumen
5	4	20	22	Penyusunan data kepegawaian	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan
5	4	20	35	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	76.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan
5	4	20	69	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	64.285.000	7 Dokumen	75.000.000	7 Dokumen	80.000.000	7 Dokumen	90.000.000	7 Dokumen	110.000.000	7 Dokumen
5	4	20	77	Peningkatan Data dan Informasi	70.017.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	85.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket
5	4	25		Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan										
5	4	25	25	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	0		85.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen
TOTAL					6.080.000.000		19.305.000.000		20.551.000.000		21.186.100.000		22.669.210.000	

2.2. Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

Dari form hasil evaluasi yang terdapat pada lampiran, dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2016 atau periode 2 perencanaan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung periode 2015 – 2019 untuk kinerja keuangannya sudah terealisasi sebesar Rp. 10.815.356.686,- atau sebesar 10,96 persen dari total anggaran renstra sebesar Rp. 98.641.044.000,-. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sudah sebesar 25,28 persen. Realisasi fisik ini masih tergolong kecil dan jauh dari harapan karena tahun 2016 ini adalah periode tahun ke 2 pelaksanaan Renstra 2015 – 2019. Hal ini dapat di pahami dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan pada Renstra periode 2015 – 2019 yang belum mendapatkan porsi anggaran karena terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Lampung.

Berikut adalah rekapitulasi kinerja Renja sampai dengan tahun 2016 terhadap Renstra periode 2015 – 2019. Rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2015 ditambah tahun 2016 dengan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan sampai dengan tahun 2016 (2015 + 2016) pada Renstra dikali 100 persen.

2.2.1. Matriks Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Kode Permendagri	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2016		Target Kinerja Capaian Program (Renja SKPD) Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Tahun 2017		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
1	02.11.15.003	Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	Jumlah KSP/USP dan KJKS/UJKS yang dinilai kesehatannya	180	650.000.000	50	98.785.000	25	61.990.000	25	61.953.000	100	99,94	75	160.738.000	0,42	0,25
2	02.11.15.010	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	Jumlah peserta rapat Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM	150	480.000.000	60	154.203.000	30	150.000.000	30	149.006.320	100	99,34	90	303.209.320	0,6	0,63
3	02.11.15.015	Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota	Jumlah Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota yang termonitoring dan terevaluasi	200	390.000.000	50	79.950.000	50	50.000.000	50	49.891.000	100	99,78	100	129.841.000	0,5	0,33
4	02.11.15.020	Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit	Jumlah KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit yang terawasi pelaksanaan USPnya	40	200.000.000	20	42.257.000	10	96.250.000	10	96.082.000	100	99,83	30	138.339.000	0,75	0,69
5	02.11.15.025	Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri	Jumlah Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri	24	3.300.000.000	0	0	5	807.840.000	5	651.577.896	100	80,66	5	651.577.896	0,21	0,2
6	02.11.15.027	Pendataan dan pembinaan KUMKN	jumlah Pendataan dan pembinaan KUMKM	4	270.000.000	0	0	2	600.000.000	1	29.704.000	50	4,95	1	29.704.000	0,25	0,11
7	02.11.15.048	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	jumlah Pengembangan Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	70	300.000.000	0	0	10	100.000.000	10	99.500.000	100	99,5	10	99.500.000	0,14	0,33
8	02.11.16.001	Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	60	3.300.000.000	24	777.505.000	12	600.000.000	12	532.599.400	100	88,77	36	1.310.104.400	0,6	0,4
9	02.11.16.004	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	jumlah KUMKM yang termonitor dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUDnya	935	1.430.000.000	300	274.681.000	140	100.000.000	140	99.755.000	100	99,76	440	374.436.000	0,47	0,26
10	02.11.16.005	Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	jumlah peserta Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima dana bergulir BLUD	460	1.030.000.000	90	129.340.000	90	184.019.000	90	183.994.000	100	99,99	180	313.334.000	0,39	0,3
11	02.11.19.016	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	1.042	4.000.000.000	570	1.965.417.400	521	2.000.000.000	521	1.971.316.499	100	98,57	1.091	3.936.733.899	1,05	0,98
12	02.11.20.009	Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	jumlah peserta Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur	240	755.000.000	0	0	65	267.925.000	65	264.543.000	100	98,74	65	264.543.000	0,27	0,35
13	02.11.20.011	Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	Jumlah peserta Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian	400	600.000.000	0	0	30	62.458.000	30	61.504.600	100	98,47	30	61.504.600	0,08	0,1

14	02.11.20.012	Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	Jumlah peserta Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP	120	500.000.000	0	0	30	52.840.000	30	52.660.000	100	99,66	30	52.660.000	0,25	0,11
15	02.11.21.001	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	10	2.200.000.000	4	364.105.000	2	127.062.000	2	122.853.200	100	96,69	6	486.958.200	0,6	0,22
16	02.11.21.002	Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	Jumlah Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	75	2.250.000.000	30	257.506.700	15	313.320.000	15	307.186.000	100	98,04	45	564.692.700	0,6	0,25
17	02.11.21.014	Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	75	754.000.000	15	79.107.000	15	94.600.000	15	94.540.000	100	99,94	30	173.647.000	0,4	0,23
18	02.11.21.048	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi	180	300.000.000	0	0	60	100.000.000	60	97.201.800	100	97,2	60	97.201.800	0,33	0,32
19	02.11.21.049	Diklat dan Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	jumlah peserta Diklat Akuntabilitas bagi Pengelola Koperasi	120	300.000.000	0	0	40	100.000.000	40	99.970.000	100	99,97	40	99.970.000	0,33	0,33
20	05.04.15.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa surat menyurat	60	188.000.000	24	15.222.000	12	2.000.000	0	0	0	0	24	15.222.000	0,4	0,08
21	05.04.15.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan penyediaan rekening telepon, air dan listrik	60	1.070.000.000	24	314.402.336	12	225.000.000	12	154.213.050	100	68,54	36	468.615.386	0,6	0,44
22	05.04.15.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	60	1.327.400.000	24	449.200.000	12	340.600.000	12	339.800.000	100	99,77	36	789.000.000	0,6	0,59
23	05.04.15.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	60	183.443.600	24	34.942.800	12	110.000.000	12	109.850.000	100	99,86	36	144.792.800	0,6	0,79
24	05.04.15.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	60	320.000.000	24	65.498.800	12	18.000.000	12	18.000.000	100	100	36	83.498.800	0,6	0,26
25	05.04.15.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	92.054.000	24	19.053.500	12	15.000.000	12	15.000.000	100	100	36	34.053.500	0,6	0,37
26	05.04.15.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	2	200.000.000	0	0	1	40.000.000	1	39.000.000	100	97,5	1	39.000.000	0,5	0,2
27	05.04.15.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15	135.000.000	6	20.487.000	3	16.000.000	3	12.388.000	100	77,43	9	32.875.000	0,6	0,24
28	05.04.15.017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Jumlah pembiayaan penyediaan makanan dan minuman	60	220.000.000	24	36.121.000	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100	36	46.121.000	0,6	0,21
29	05.04.15.018	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	42	868.907.000	20	272.232.600	10	177.900.000	10	177.645.324	100	99,86	30	449.877.924	0,71	0,52
30	05.04.15.022	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	90	418.004.000	36	195.169.800	18	78.500.000	18	77.888.000	100	99,22	54	273.057.800	0,6	0,65
31	05.04.15.029	Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah pameran dan promosi pembangunan	5	803.000.000	1	59.000.000	1	80.000.000	1	71.000.000	100	88,75	2	130.000.000	0,4	0,16
32	05.04.16.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	3	895.734.000	0	0	1	265.734.000	1	259.684.000	100	97,72	1	259.684.000	0,33	0,29
33	05.04.16.018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48	840.000.000	12	78.452.575	12	15.000.000	12	14.780.000	100	98,53	24	93.232.575	0,5	0,11
34	05.04.16.020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	888.253.400	24	102.531.724	12	121.075.000	12	77.049.998	100	63,64	36	179.581.722	0,6	0,2

35	05.04.16.024	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	375.000.000	0	0	12	10.000.000	12	10.000.000	100	100	12	10.000.000	0,2	0,03
36	05.04.20.001	Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan	60	237.800.000	24	53.440.000	13	44.000.000	13	43.964.000	100	99,92	37	97.404.000	0,62	0,41
37	05.04.20.022	Penyusunan data kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang disusun	60	370.000.000	24	70.366.500	12	122.400.000	12	122.400.000	100	100	36	192.766.500	0,6	0,52
38	05.04.20.035	Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Jumlah pembiayaan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	50	501.000.000	24	164.999.500	12	102.306.000	12	101.106.000	100	98,83	36	266.105.500	0,72	0,53
39	05.04.20.069	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja	35	419.285.000	17	13.147.800	10	85.000.000	10	84.312.500	100	99,19	27	97.460.300	0,77	0,23
40	05.04.20.077	Peningkatan Data dan Informasi	jumlah pembiayaan Peningkatan Data dan Informasi	60	405.017.000	24	118.864.000	12	52.000.000	12	50.750.000	100	97,6	36	169.614.000	0,6	0,42
41	05.04.25.025	Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Jumlah rapat Musrenbang SKPD	4	395.000.000	1	126.586.634	1	230.600.000	1	227.801.300	100	98,79	2	354.387.934	0,5	0,9
42	05.04.16.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembiayaan pengadaan perlengkapan gedung kantor	5	1.600.000.000	2	658.504.000	1	1.034.600.000	1	1.007.734.200	100	97,4	3	1.666.238.200	0,6	1,04
43	05.04.19.026	Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	Jumlah peningkatan SDM aparatur pembina KUMKM Provinsi	60	330.000.000	6	69.950.000	12	120.000.000	12	95.440.000	100	79,53	18	165.390.000	0,3	0,5
44	02.11.15.014	Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM	jumlah temu konsultasi pemberdayaan usaha kumkm	5	425.000.000	3	117.670.000	1	100.000.000	1	99.936.000	100	99,94	4	217.606.000	0,8	0,51
45	02.11.15.033	Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	Jumlah pameran dan promosi produk unggulan	4	1.200.000.000	2	336.595.800	2	75.000.000	2	75.000.000	100	100	4	411.595.800	1	0,34
46	02.11.15.035	Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	jumlah pendampingan PLUT	4	650.000.000	0	0	1	150.000.000	1	146.731.479	100	97,82	1	146.731.479	0,25	0,23
47	02.11.21.003	Workshop Revitalisasi Koperasi	jumlah peserta workshop	500	650.000.000	50	67.980.000	50	100.000.000	50	98.030.000	100	98,03	100	166.010.000	0,2	0,26
48	02.11.21.047	Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpan pinjam	jumlah peserta pelatihan	320	930.000.000	0	0	50	100.000.000	50	97.901.000	100	97,9	50	97.901.000	0,16	0,11
Rata-Rata capaian kinerja %												95	90	0	0	0	0

2.3. Rencana Kerja Tahun 2018

1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja OPD, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UKM.
2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UKM
3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UKM melalui peningkatan kemampuan koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UKM melalui peningkatan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UKM.
6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru
7. Perbaiki iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UKM
8. Penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja.

2. Sasaran

Untuk menunjang Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017, yang menjadi sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
2. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.
3. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UKM berdasarkan hasil kajian.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi dan UKM.

5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi dan UKM.
6. Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif.
7. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (*passion*) kewirausahaan di kalangan masyarakat
8. Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula.
9. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.

Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada koperasidan UKM.

3. Program

Bahwa yang menjadi kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah :

1. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM;
2. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UKM;
3. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UKM;
4. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM;
5. Strategi peningkatan akses kepada sumberdaya produktif.

Atas dasar kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka yang menjadi program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM
6. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM
7. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/ Revitalisasi Kelembagaan
9. Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKM
10. Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan.

4. Kegiatan

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sebagai gambaran dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah dituangkan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya visi dan misi yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2016, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 394.000.000,-
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 402.720.000,-
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 120.000.000,-
4. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 30.580.000,-
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan biaya Rp. 15.000.000,-
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan biaya Rp. 10.000.000,-
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan biaya Rp. 18.000.000,-

8. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 14.880.000,-
9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 145.560.000,-
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan biaya Rp. 132.000.000,-
11. Pameran dan Promosi Pembangunan, dengan biaya Rp. 108.000.000,-
12. Penatausahaan barang milik daerah, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan biaya Rp. 25.000.000,-
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 173.380.000,-
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan biaya Rp. 25.000.000,-
17. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 40.000.000,-
18. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 87.551.500,-
19. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 211.800.000,-
20. Penyusunan program dan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
21. Peningkatan Data dan Informasi, dengan biaya Rp. 66.000.000,-
22. Monev dan sinkronisasi program, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
23. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
24. Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam Provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
25. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah, dengan biaya Rp. 625.000.000,-
26. Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM, dengan biaya Rp. 75.176.000,-
27. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), dengan biaya Rp. 50.000.000,-

28. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi, dengan biaya Rp. 76.176.250,-
29. Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi, dengan biaya Rp. 75.000.000,-
30. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
31. Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
32. Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeri, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
33. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
34. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-
35. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
36. Peningkatan jenis usaha koperasi, dengan biaya Rp. 60.000.000,-
37. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 2.000.000.000,-
38. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi, dengan biaya Rp. 115.000.000,-
39. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi, dengan biaya Rp. 150.000.000,-
40. Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
41. Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 50.000.000,-
42. Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-
43. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, dengan biaya Rp. 70.000.000,-
44. Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi, dengan biaya Rp. 200.176.250,-
45. Penyelenggaraan musrenbang SKPD, dengan biaya Rp. 80.000.000,-

2.3.1. Matriks RKT Tahun 2018

Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2018
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lampung	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	16 %	1. Meningkatkan Peran Koperasi dalam Perekonomian Lampung	a. Jumlah Koperasi Aktif	3.167 Unit	1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM	a. Jumlah koperasi yang mendapat akses kredit ke perbankan	20 Kop
	2. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja sektor Koperasi	4,5 %		b. Persentase Omzet Koperasi terhadap PDRB Lampung	1 %		b. Jumlah koperasi yang mendapat akses bantuan permodalan dari lembaga penyaluran dana bergulir baik Pusat maupun Daerah	15 Kop
	3. Persentase Pertumbuhan Rata-Rata Volume Usaha Koperasi	1 %	2. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi dan Partisipasi Masyarakat	a. Jumlah Tenaga Kerja Koperasi	7.525 Orang	2. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	c. Jumlah koperasi yang mendapat akses kemitraan dengan perusahaan pabrik dan perkulanan	10 Kop
				b. Jumlah Anggota Koperasi	924.894 Orang		a. Jumlah koperasi serba usaha dengan varian unit usaha bertambah	10 Kop
			3. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Jangkauan Pemasaran Produk Koperasi	8 Provinsi	b. Terbentuknya PT. Jaminan Kredit Daerah	1 Unit	
						c. Jumlah Provinsi yang terjangkau pemasaran produk koperasi	8 Provinsi	
						d. Jumlah Negara yang terjangkau Produk Koperasi	1 Negara	
						e. Jumlah Koperasi yang Terfasilitasi dalam Sengketa Hukum	2 Kop	
						3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi dan Partisipasi Masyarakat	a. Jumlah sumber daya manusia (SDM) koperasi yang menguasai standar akuntansi koperasi	50 Orang
							b. Jumlah sumber daya manusia (SDM) koperasi yang memahami manajemen pemasaran	50 Orang
							c. Jumlah sumber daya manusia (SDM) koperasi yang memahami system online dalam pengelolaan dan pemasaran produk koperasi	50 Orang
			4. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi	a. Jumlah Koperasi Aktif yang melaporkan Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan	800 Kop	4. Meningkatnya Ketersediaan Data	a. Tersedianya Data dan Informasi tentang Koperasi	15 Kab/ Kota

				b. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Usaha Koperasi	30 Kop		b. Pemutakhiran Data Koperasi Berdasarkan Online Data Sistem	5.330 Kop
		5. Meningkatnya Ketersediaan Data Keragaan Koperasi	Jumlah Keragaan Data Koperasi		15 Kab/ Kota	5. Meningkatnya Jumlah Koordinasi Koperasi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Usaha	30 Kop
		6. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UKM	a. Jumlah Pelaksana Koperasi yang dilatih		1.000 Kop	6. Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Meningkat dan Berkembang Usaha serta Kelembagaannya	a. Jumlah Koperasi yang Memperoleh Nomor Induk Koperasi dan Quick Response Anggota Tahunan	150 Kop
			b. Jumlah Pelaksana UKM yang dilatih		600 UKM	7. Meningkatnya Pelayanan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM	b. Jumlah Koperasi yang Rapat Anggota Tahunan	800 Kop
						8. Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM yang Meningat Kapasitasnya	c. Jumlah Koperasi yang Berprestasi	12 Kop
		7. Meningkatnya Akses Permodalan bagi Koperasi dan UKM	a. Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat Akses Permodalan pada Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan		8.000 KUKM	9. Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM yang dimonitoring	a. Jumlah Peningkatan Pelayanan Perkantoran UPTD Balatkop	12 Bulan
			b. Jumlah Kredit yang disalurkan		20 Milyar	10. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UKM	b. Jumlah Diklat yang dilaksanakan	30 Kali
						11. Meningkatnya Pelayanan UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan UKM	a. Jumlah Pelaku Koperasi yang dilatih	1.000 Kop
						12. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pinjaman Koperasi dan UKM	b. Jumlah Pelaku UKM yang dilatih	600 UKM
							c. Jumlah Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang bersertifikat	100 KUKM
							Jumlah Pelaku Koperasi dan UKM yang dievaluasi setelah dilatih	800 KUKM
							a. Jumlah Pelaksana Koperasi yang dilatih	900 Koperasi
							b. Jumlah Pelaksana UKM yang dilatih	500 UKM
							a. Jumlah Peningkatan Pelayanan Perkantoran UPTD BLUD	12 Bulan
							b. Jumlah Proposal yang Layak mendapat Pinjaman BLUD	10.000 KUKM
							a. Jumlah Penagihan Pinjaman Kepada Koperasi dan UKM Priode Tahun 2003 s/d 2016	10 Trilyun
							b. Penyelesaian Pinjaman Koperasi dan UKM yang bermasalah	1 KUKM

Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	350 %	8. Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan	a. Jumlah Wirausaha Baru	50 UKM	13. Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat Fasilitas Akses Permodalan BLUD	a. Jumlah Pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	10.000 KUKM
				b. Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih	50 UKM		b. Jumlah Koperasi dan UKM yang termonitoring dan Terevaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir BLUD	10.000 KUKM
							c. Jumlah Peserta Diklat Perkuatan Modal Usaha bagi UKM Calon/Penerima Dana Bergulir BLUD	10.000 KUKM
	2. Jumlah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	97.122 UMKM	9. Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan UKM	a. Jumlah UKM yang dibina	2.000 UKM	14. Meningkatnya Kualitas Kewirausahaan	a. Jumlah Wirausaha Baru	50 UKM
				b. Jumlah Sentra Usaha UKM yang dibina	1 Sentra		b. Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih	50 UKM
	3. Persentase Pelaku Usaha yang Bernilai Tambah dari Aspek Sertifikasi, HaKI, dan Paten	100 %	10. Meningkatnya Jaringan Usaha dan Pemasaran	a. Jangkauan Pemasaran	5 Provinsi	15. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan UKM	a. Jumlah UKM yang dibina	2.000 UKM
							b. Jumlah sentra usaha UKM yang dibina	1 Sentra
							a. Jumlah UKM yang mendapat akses permodalan	30 UKM
			11. Meningkatnya Pengawasan terhadap Kelembagaan dan Usaha Koperasi	a. Jumlah Pelaku Usaha yang Bernilai Tambah dari aspek, HaKI dan Paten	12 UKM	16. Meningkatnya jaringan usaha dan pemasaran	b. Jumlah UKM yang mendapat HaKI dan Paten	12 UKM
				b. Jumlah UKM yang Mendapat Akses Permodalan	30 UKM		c. Jangkauan pemasaran	5 Provinsi
							a. Jumlah peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang – undangan	25 Kop
	12. Meningkatnya Pemahaman Aturan Perkoperasian	a. Jumlah koperasi yang diaudit oleh akuntan publik	20 Kop	17. Meningkatnya Pengawasan terhadap Penerapan Aturan Perkoperasian Tingkat Provinsi	b. Jumlah koperasi yang diawasi penerapan peraturan usaha koperasi	15 Kop		
b. Jumlah pengawasan dan pemeriksaan pada kelembagaan koperasi, kepatuhan, legalitas dan tata laksana terhadap peraturan dan perundang-undangan koperasi		30 Kop	c. Jumlah penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kelembagaan, usaha dan pembiayaan koperasi		7 Kop			
	a. Jumlah pengawasan dan pemeriksaan pada kelembagaan koperasi, kepatuhan, legalitas dan tata laksana terhadap peraturan dan perundang-undangan koperasi	15 Kop						

				b. Jumlah penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kelembagaan, usaha dan pembiayaan koperasi jumlah peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan	7 Kop	18. Meningkatnya Upaya Penilaian Kesehatan Koperasi	a. Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	30 Kop
		13. Meningkatnya Kualitas dan Kesehatan Koperasi		a. Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	30 Kop		b. Jumlah monev terhadap Tindaklanjut penilaian simpan pinjam koperasi	25 Kop
				b. Jumlah monev terhadap tindak lanjut penilaian simpan pinjam koperasi	25 Kop		c. Jumlah evaluasi dan pelaporan penilaian kesehatan koperasi	20 Kop
				c. Jumlah Evaluasi dan pelaporan penilaian kesehatan koperasi	20 Kop	19. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Usaha Koperasi	a. Jumlah koperasi yang diaudit oleh Akuntan Publik	20 Kop
		14. Meningkatnya kualitas SDM KUMKM dan Pemanapan kelembagaan KUMKM		Jumlah KUMKM yang terlayani	60 KUMKM		b. Jumlah pengawasan dan pemeriksaan pada kelembagaan koperasi, kepatuhan, legalitas dan tata laksana terhadap peraturan perundang undangan koperasi	30 Kop
		15. Meningkatnya kinerja layanan terpadu PLUT bagi KUMKM		Jumlah sentra UKM yang menjadi mitra binaan PLUT	15 Sentra UKM	20. Meningkatnya kualitas SDM KUMKM dan Pemanapan kelembagaan KUMKM	Jumlah KUMKM yang terlayani	60 KUMKM
		16. Meningkatnya fasilitasi akses pemasaran UMKM		Jumlah UMKM yang didampingi go online	50 UMKM	21. Meningkatnya kinerja layanan terpadu PLUT bagi KUMKM	Jumlah sentra UKM yang menjadi mitra binaan PLUT	15 Sentra UKM
		17. Meningkatnya kualitas SDM UMKM		Jumlah UMKM yang memperoleh layanan pengelolaan keuangan	50 UMKM	22. Meningkatnya fasilitasi akses pemasaran UMKM	Jumlah UMKM yang didampingi go online	50 UMKM
						23. Meningkatnya kualitas SDM UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh layanan pengelolaan keuangan	50 UMKM
		18. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perkantoran yang Tertib Administrasi		a. Persentase Tertib Adminitrasi Barang	90%	24. Meningkatnya pelayanan perkantoran yang Memenuhi Tertib Administrasi	a. Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
				b. Indeks kepuasan masyarakat	B		b. Persentase Disiplin Pegawai	90%
		19. Meningkatnya Akuntabilitas Keuanga		a. Persentase LHP ditindaklanjuti	100%	25. Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	Jumlah Pemanfaatan Barang dan Jasa	12 Bulan
				b. Jumlah Laporan Keuangan	13 Dok	26. Meningkatnya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat	2 Orang
		20. Optimalnya penyusunan perencanaan Program / Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung		a. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	10 Dok	27. Meningkatnya capaian kinerja dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen laporan keuangan	10 Dok
				b. Jumlah Waktu Data dan Informasi	12 Bulan	28. Meningkatnya Capaian Administasi Keuangan yang Lebih Baik	Persentase Temuan yang di tindaklanjuti	100%
				c. Nilai Evaluasi SAKIP	B	29. Meningkatnya capaian kinerja	a. Jumlah dokumen perencanaan	10 Dok
							b. Nilai AKIP	B

						30. Meningkatnya ketersediaan data dan Informasi	Jumlah data dan informasi	12 Bulan
						31. Meningkatnya Sinkronisasi program antara Pusat dengan Daerah	Jumlah Koordinasi antara pusat dan Daerah	15 Kab/ Kota

BAB III PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar **100%**.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2018.